

PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BERBASIS SISTEM KEKERABATAN (Kinship System Based Old People Social Service)

SURADI

Abstract Older people in Indonesia keeps on rising from year to year. In 2020, it is predicted that there are about 28,8 million older people or 11,34% of the total population. The rising of older population should not be worry if we create develop by government, social organization and kinship system. Therefore, we need an effort to revitalize social organization and make kinship system in local level into institution in order to create synergy among those social service system.

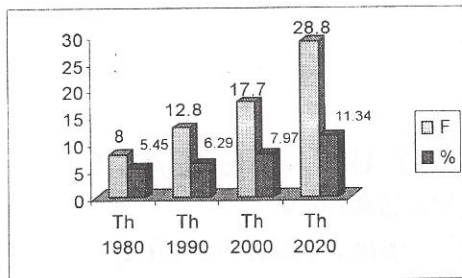
Key words: Social service, Old people, Kinship System

1. PENDAHULUAN

Menjadi tua merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, karena merupakan siklus kehidupan pada setiap makhluk hidup. Dengan demikian, menjadi tua merupakan hal yang wajar pada setiap makhluk hidup, tidak terkecuali pada manusia. Permasalahan pada usia tua ini terjadi, ketika lanjut usia mengalami penurunan dan atau kehilangan potensi yang dimilikinya, disebabkan adanya gangguan pada fungsi fisik-organik, ekonomi, sosial maupun psikis. Penurunan dan atau kehilangan segenap potensi ini menyebabkan lanjut usia mengalami penurunan kemandirian, partisipasinya rendah dalam pembangunan, keterbatasan dalam mengakses berbagai pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dan adanya perasaan penurunan martabat.

Mulai tahun 1980-an, permasalahan lanjut usia ini telah menjadi isu global. Dimulai dengan (1) *International Plan of Action of Aging (Vienna Plan)* dengan resolusi nomor 37/51 tahun 1982, (2) *United Nations Principles of Older Person* tahun 1991 dengan resolusi nomor 46/1991, (3) *Macao Plan of Action* dalam sidang ESCP tahun 1998, dan (4) *The Second World Assembly on Ageing* di Madrid tahun 2002. Semua itu menunjukkan, bahwa keberadaan lanjut usia sama strategisnya dengan anak-anak maupun remaja dalam kerangka pembangunan bangsa. Karena itu, setiap negara perlu memberikan respon yang positif dalam bentuk kebijakan dan program sosial sebagai wujud keberpihakannya kepada lanjut usia.

Di Indonesia, pada dua dasa warsa terakhir ini terjadinya perubahan demografi yang ditandai dengan peningkatan secara nyata penduduk lanjut usia, sebagaimana tampak pada diagram berikut :



Sumber : Biro Pusat Statistik, 2000

Data tersebut menunjukkan, bahwa di Indonesia setiap sepuluh tahun terjadi peningkatan populasi lanjut usia berkisar 4,8 - 5,5 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami bom lanjut usia, yaitu sejumlah 28,8 juta jiwa atau 11,34 persen dari jumlah penduduk. Perubahan demografi tersebut di satu sisi menunjukkan keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan dan gizi. Namun demikian, di sisi lain terjadinya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia merupakan permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan pada umumnya mereka mengalami permasalahan yang khas, yaitu penurunan produktivitas, dan bahkan banyak yang sudah tidak produktif lagi. Bagi mereka yang tidak produktif ini sebagian menghabiskan masa hidupnya bergantung pada anak, cucu atau famili lainnya, dan bahkan sebagian dari mereka hidup tanpa sanak famili di panti 'jompo'.

Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk lanjut usia ini lebih nyata ditemukan di perkotaan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dengan terjadinya pergeseran fungsi dan peranan keluarga, disebabkan oleh semakin menguatnya tuntutan keluarga dalam berbagai bidang. Akibatnya lanjut usia kurang memperoleh perhatian

secara memadai dari keluarganya. Maka kemudian timbullah permasalahan pada lanjut usia, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan psiko-sosial. Mereka merasa sendirian, merasa terabaikan, kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, tidak lagi sebagai tempat mencurahkan isi hati anak cucu dan sebagainya.

Menyadari permasalahan lanjut usia di satu sisi, dan peranan lanjut usia dalam kerangka pembangunan bangsa di sisi lain, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sosial. Bentuk tanggung jawab negara tersebut diterjemahkan oleh Departemen Sosial ke dalam sejumlah sistem pelayanan sosial, seperti (1) Panti Sosial Tresna Werdha, (2) Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA), (3) Karang Lanjut Usia, (4) Karang Werdha, (5) Posyandu Lanjut Usia, (6) KUBE-Lansia, dan (7) pelayanan lanjut usia berbasis masyarakat. Dengan demikian ada tujuh sistem pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat. Namun pada kenyataannya, pelayanan sosial melalui berbagai sistem tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lanjut usia secara memadai dan jangkauannya pun masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah populasi lanjut usia dengan kapasitas penanganannya. Kendala yang paling dirasakan adalah terbatasnya sumber daya manusia, baik jumlah dan mutunya, sarana prasarana serta dana yang dialokasikan untuk membiayai operasionalisasi pelayanan sosial bagi lanjut usia.

Permasalahan tersebut yang mendorong Departemen Sosial untuk

mengembangkan sistem pelayanan sosial alternatif bagi lanjut usia. Upaya ini dilakukan sebagai strategi terobosan agar pelayanan sosial mampu menjangkau populasi lanjut usia yang lebih banyak lagi. Ada dua sistem alternatif yang dikembangkan, yaitu (1) Sistem Subsidi Silang pelayanan lanjut usia di dalam panti (PSTW), dan (2) Sistem Pelayanan Sosial Harian (Komersial) bagi lanjut usia potensial di luar panti. Kedua sistem tersebut relatif baru (masih dalam masa uji coba), sehingga sampai saat ini belum dapat diketahui efektivitasnya.

Komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia tersebut merupakan wujud tanggung jawab, dan sebagai kemauan politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Meskipun demikian, sebagaimana ditegaskan di dalam GBHN maupun Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, bahwa dalam proses pembangunan, semua lapisan masyarakat tidak boleh tertinggal. Dalam kaitan ini, maka masih perlu dikembangkan sistem pelayanan sosial lain yang bersumber daya masyarakat. Sehingga dalam pelayanan sosial bagi lanjut usia ini terjadi sinergi, antara sumber daya dan potensi yang berasal dari pemerintah dengan sumber daya dan potensi yang berasal dari masyarakat. Dengan terjadinya sinergi ini, maka tidak ada lanjut usia yang tidak memperoleh pelayanan sosial atau mengalami ketelantaran.

2. KEBUTUHAN LANJUT USIA

Secara konseptual, kebutuhan adalah sesuatu yang menuntut pemenuhan sesegera mungkin. Oleh karena itu,

apabila kebutuhan ini tidak dapat segera dipenuhi, akan menimbulkan masalah pada seseorang. Dengan demikian, kebutuhan dan masalah merupakan kondisi yang berlawanan secara ekstrim.

Secara garis besar, kebutuhan lanjut usia dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

2.1. Kebutuhan Fisik dan Kesehatan

Penurunan kondisi fisik dan kesehatan pada lanjut usia sebenarnya merupakan kondisi yang wajar. Berdasarkan hukum alam, setiap makhluk hidup dan juga benda mati sekalipun, semakin tua semakin menurun kondisi fisiknya. Penurunan kondisi fisik ini tentu saja akan berpengaruh pada aktivitas dan tingkat produktivitas.

Pada manusia terdapat beberapa ciri yang secara umum menunjukkan penurunan kondisi fisik, seperti berkurangnya penglihatan, pendengaran, rambut mulai beruban dan semakin lemahnya fungsi panca indera lainnya. Penurunan kondisi fisik ini, kemudian menyebabkan kerentanan terhadap berbagai penyakit seperti kolesterol, diabetes, sesak nafas/asma, asam urat, darah tinggi, rematik dan sebagainya.

Meskipun kondisi fisik dan kesehatan tersebut merupakan gejala umum pada lanjut usia, namun tidak semua lanjut usia dapat menerima kondisinya seperti itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawton dan Cohen (Sudijar, 1994), bahwa ada korelasi positif antara kesehatan dengan semangat, perilaku sosial dan kegiatan di waktu senggang. Kemudian Guerland (Sudijar, 1994) mencermati adanya hubungan sebab akibat antara situasi emosional dengan kondisi fisik.

Dikemukakan bahwa faktor-faktor emosional dan stress dapat menyebabkan gangguan fisik, sebaliknya gangguan fisik dapat mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi emosional negatif. Kondisi fisik yang kronis dapat menjadi faktor penyebab yang kuat untuk terjadinya depresi.

Terkait dengan kondisi fisik dan kesehatan lanjut usia tersebut, maka kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah menjaga asupan gizi yang tepat pada lanjut usia. Tentunya dengan mempertimbangkan risiko kesehatannya, jenis-jenis penyakit pada lanjut usia, dan berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga lanjut usia. Pada lanjut usia dari keluarga yang status sosial ekonominya lemah, tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi terkait dengan asupan gizi sebagaimana yang diharapkan.

Selain asupan gizi, olah raga ringan (senam lansia dan jalan santai) merupakan upaya untuk memelihara kesegaran fisik, yang dapat mencegah gangguan kesehatan. Kemudian mengurangi aktivitas yang banyak menguras tenaga fisik, dan atau tidak menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan pemikiran yang rumit.

2.2. Kebutuhan Sosial-Psikologis

Sebagian lanjut usia pernah memiliki kedudukan, jabatan dan posisi penting dalam sebuah organisasi atau dalam lingkungan keluarganya. Ketika memasuki masa purna bakti, semuanya itu harus ditinggalkan. Biasanya melepaskan semua posisi tersebut menimbulkan konflik batin yang relatif sulit diatasi. Lanjut usia

merasa kehilangan perhatian, dukungan dari lingkungan sosial, merasa kesepian, merasa kurang dihargai dan bahkan menjadi telantar khususnya bagi lanjut usia dari keluarga yang sosial ekonominya lemah.

Terkait dengan itu, menurut Siti Rahayu Handitono (1993) jenis kebutuhan sosial-psikologis lanjut usia yang perlu disediakan, adalah (1) kebutuhan akan hubungan sosial, (2) kebutuhan aktivitas, (3) kebutuhan untuk mandiri, (4) kebutuhan seks, (5) kebutuhan dihormati, (6) kebutuhan spiritual, dan (7) kebutuhan akan perhatian.

Pemahaman atau asesmen terhadap sejumlah kebutuhan lanjut usia tersebut menjadi sangat penting, sebagai dasar dalam memberikan pelayanan sosial yang tepat bagi mereka. Karena tanpa terlebih dahulu memahami sejumlah kebutuhan lanjut usia tersebut dengan tepat, tentu dalam pemberian pelayanan sosial akan terjadi masalah yang akan merugikan para lanjut usia.

3. SISTEM KEKERABATAN SEBAGAI BASIS PELAYANAN SOSIAL

Salah satu potensi kesejahteraan sosial yang telah terlembaga dalam masyarakat Indonesia adalah sistem kekerabatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak mengembangkan sistem kekerabatan ini. Berbagai manfaat telah dirasakan oleh warga masyarakat dengan mengembangkan sistem kekerabatan, terutama pada penyelenggaraan aktivitas sekitar

kerumah-tangga. Oleh sebab itu, sistem kekerabatan ini perlu mendapatkan perhatian dan diharapkan masuk ke dalam rencana strategis pembangunan kesejahteraan sosial.

3.1 Sistem Kekerabatan

Istilah kekerabatan (*kinship*) telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya masyarakat memahami istilah kerabat ini dengan saudara yang masih memiliki pertalian darah. Pada masyarakat perdesaan, kekerabatan masih terasa kedekatan hubungannya dengan keluarga inti. Pada setiap peristiwa-peristiwa kerumah-tangga, kerabat selalu dilibatkan. Seperti pada selamat kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, mendirikan rumah, pindah rumah dan lain-lain, tidak bisa meninggalkan para kerabat. Meskipun tidak seintensif di perdesaan, kekerabatan dapat ditemukan di perkotaan juga. Sekelompok orang yang masih ada peralian darah mendirikan perkumpulan seketurunan (*trah*), dalam upaya untuk memelihara dan memperkuat pertalian keluarga besar. Di sela-sela kesibukannya, secara berkala mereka masih menyediakan waktu untuk bertemu dengan anggota kekerabatan.

Kekerabatan merupakan istilah lain dari keluarga luas atau secara sosiologis dikenal dengan istilah *somah*. Di dalam *somah* ini terdiri dari suami-isteri dan anak-anak ditambah dengan kakek-nenek, paman-bibi, kemenakan dan saudara-saudara lainnya. Dalam sistem kekerabatan ini anggotanya terdiri dari beberapa generasi. Salah satu contoh sistem kekerabatan yang menganut garis

keturunan ayah adalah sistem kekerabatan pada masyarakat Batak, yang dikenal dengan *marga*. Kemudian contoh sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan ibu adalah sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau (Vembriarto dalam Gunawan, 2004).

Kemudian berdasarkan fungsinya, menurut GP Murdock yang dikutip oleh Koentjaraningrat (Gunawan, 2004) sistem kekerabatan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Sistem kekerabatan berkorporasi. Sistem kekerabatan ini sifatnya eksklusif yang di dalamnya memiliki unsur sistem norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok, rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya, interaksi yang intensif antar warga kelompok, sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok, pemimpin yang mengatur kegiatan kelompok dan sistem hak dan kewajiban terhadap kasta produktif, kasta konsumtif atau kasta pusaka tertentu.
- b. Sistem kekerabatan kadangkala. Sistem kekerabatan ini tidak memiliki unsur-unsur sebagaimana pada sistem kekerabatan berkorporasi, anggotanya banyak, sehingga tidak mungkin terjadi interaksi yang intensif.
- c. Sistem kekerabatan menurut adat. Sistem kekerabatan ini memiliki unsur sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi warga kelompok dan terhadap kasta; dan memiliki pemimpin yang mengatur kegiatan kelompok. Karena sistem ini anggotanya cukup besar, maka antar warga dapat saling mengenal dengan tanda-tanda yang ditentukan adat.

Ketiga kategori sistem kekerabatan tersebut terdapat di masyarakat Indonesia, dan sampai saat ini masih berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahkan, meskipun warga masyarakat dan anggota sistem kekerabatan tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya. Mereka masih memelihara hubungan dengan keluarga besarnya di daerah asal. Secara berkala mereka menghimpun dana dan disumbangkan untuk pembangunan di daerah asalnya. Sebagai contoh, di Jakarta ada paguyuban keluarga Tegal, paguyuban arek Malang, persaudaraan warga Minang dan sebagainya.

Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui, bahwa sistem kekerabatan yang dikelola dengan baik dapat didayagunakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, bertambahnya penduduk lanjut usia tidak perlu menjadi persoalan lagi, karena ada sebuah sistem yang secara alamiah dan terlembaga mampu memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia tersebut secara memadai.

Memang tidak dapat dipungkiri, perubahan sosial budaya yang cepat dewasa ini telah melemahkan peran dan fungsi sebagian sistem kekerabatan. Dimulai dari terjadinya perubahan pada bentuk, pola dan fungsi keluarga sebagai anggota sistem kekeluargaan. Ambisi karier anggota keluarga sebagai sub sistem dari sistem kekerabatan telah mengubah pola interaksi anggota sistem kekerabatan. Berbagai alasan dibuat oleh anggota sistem kekerabatan untuk tidak saling bertemu, yang lama kelamaan melemahkan ikatan emosional dan sosial mereka sebagai anggota sistem kekerabatan.

3.2 Bentuk-bentuk Pelayanan Sosial

Kecenderungan bergesernya bentuk keluarga, yaitu dari keluarga besar menjadi keluarga kecil dewasa ini, perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial budaya. Artinya, bahwa dalam perubahan sosial budaya terjadinya perubahan pada bentuk, pola dan sistem manajemen keluarga merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana setiap keluarga dan masyarakat pada umumnya menyikapi fakta sosial ini dengan tetap memberikan perhatian yang semestinya kepada lanjut usia.

Pada saat ini, terutama di perkotaan, ada kesulitan untuk mempertahankan keluarga besar yang di dalamnya tinggal tiga generasi. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain telah terlembaganya norma keluarga kecil dan sikap kemandirian pada anak. Boleh-boleh saja secara fisik orang tua, anak dan famili tinggal tidak dalam satu atap, bahkan tinggal berlainan desa ataupun kota. Namun demikian, berjauhan secara fisik ini diharapkan tidak mengurangi perhatiannya kepada lanjut usia. Pada kenyataannya, kondisi ideal tersebut sangat tidak mudah diwujudkan. Jarak fisik, kondisi ekonomi dan ambisi karier pada anak dan famili, merupakan kondisi yang menyebabkan para lanjut usia merasa kurang diperhatikan.

Oleh karena itu, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran, perhatian terhadap lanjut usia ini perlu terus menerus dilembagakan dalam masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lokal maupun Organisasi Sosial/LSM, perlu disinergikan dengan

program yang tumbuh dari masyarakat.

Terkait dengan sistem kekerabatan sebagai basis pelayanan sosial bagi lanjut usia, ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu :

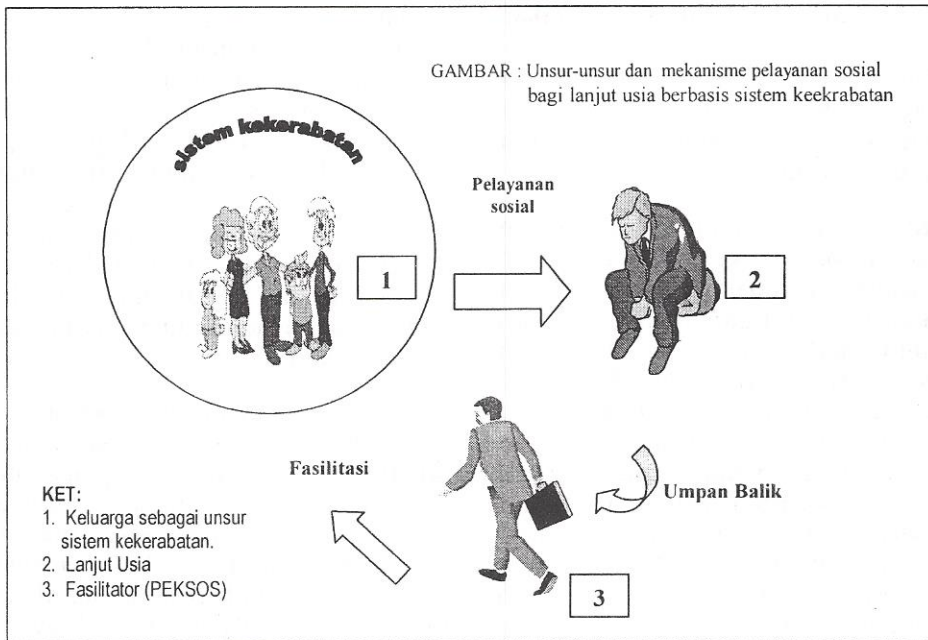
- a. Memperkuat kelembagaan sistem kekerabatan. Anggota di dalam setiap sistem kekerabatan perlu diperkuat kembali dengan menggunakan pendekatan *etnogram* (diagram silsilah). Melalui pendekatan ini, dapat dilacak silsilah keluarga minimal tiga generasi. Jaringan silsilah ini diharapkan menjadi sistem sumber informal dalam pelayanan sosial kepada lanjut usia. Sebagai contoh, untuk masyarakat Sumatera Utara ada kerukunan marga Siahaan, Sihombing dan sebagainya. Kemudian untuk masyarakat Yogyakarta ada kerukunan trah Sastro Hudoyo dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerukunan berbasis silsilah ini akan menciptakan sistem kekerabatan dengan keterikatan emosional dan moral yang sangat kuat. Oleh sebab itu, sistem kekerabatan ini tidak perlu diformalkan, biarkan ia tumbuh dan berkembang dengan kekhasannya sendiri.
- b. Mengembangkan kegiatan sosial (kekeluargaan) yang melibatkan para lanjut usia di dalamnya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh sistem kekerabatan, antara lain rekreasi keluarga, arisan keluarga, kegiatan keagamaan seperti pengajian, kebaktian dan sejenisnya. Pelibatan dalam kepanitiaan perkawinan, khitanan, anjangsana, dan tetap memelihara tradisi syukuran atau *selamatan*, ulang tahun, kelahiran dan perkawinan; selamatan : kelahiran

dan kematian dan lain-lain. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan kebutuhan lanjut usia, baik yang terkait dengan fisik dan kesehatan maupun sosial-psikologis dapat dipenuhi secara memadai. Dengan demikian lanjut usia tersebut menemukan rasa aman, merasa dihormati dan dibutuhkan oleh keluarganya. Kondisi ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi lanjut usia pada akhir hayatnya.

Melalui sistem kekerabatan sebagai basis pelayanan sosial bagi lanjut usia, diperlukan fasilitator dari pihak luar. Pihak luar dimaksud dapat berasal dari pemerintah, organisasi lokal maupun organisasi sosial/LSM. Fasilitator dari pemerintah adalah pekerja sosial dari Departemen Sosial (Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia) atau instansi sosial di daerah. Peran pekerja sosial disamping melakukan kegiatan fasilitasi, juga memberikan dampingan sampai ada penguatan pada sistem kekerabatan, dan sejumlah kegiatan pada sistem kekerabatan tersebut. Dalam praktiknya, pekerja sosial diharapkan dapat membangun sistem dasar (*basic system*) yang di dalamnya meliputi aparat pemerintah setempat (kepala desa/lurah, kepala adat/suku), tokoh masyarakat (RT/RW), tokoh dalam sistem kekerabatan, LSM, dan sistem sumber lainnya yang ada di tingkat lokal.

4. SIMPULAN

Dua kondisi yang terkait dengan pembahasan lanjut usia, *pertama* terjadinya perubahan demografi yang memperlihatkan jumlah lanjut usia semakin meningkat dari tahun ke tahun. *Kedua*, kecenderungan terjadinya



pergeseran perhatian keluarga luas terhadap lanjut usia, disebabkan oleh terjadinya perubahan bentuk dan orientasi keluarga. Oleh karena itu, sistem kekerabatan perlu diperkuat dan dilembagakan, sehingga dapat menjadi sistem sumber informal bagi lanjut usia.

- Pincus, Allan dan Anne Minahan, .1973. *Sosial Work Praticce : Model and Methode*. Illinois - USA : FE Peacock Phubliser Inc.
- Sudijar ZA, Ahmad. 1994. *Pengembangan Kualitas Usia Lanjut : Tinjauan Aspek Sosial Psikologis*. Jakarta : Balitbang Sosial.

PUSTAKA ACUAN

- Biro Pusat Statistik, 2000, *Data Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- Departemen Sosial RI, 2003, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Gunawan, dkk. 2004. *Model Pelayanan Sosial Anak Telantar Berbasis Sistem Kekerabatan*, Jakarta ; Puslitbang Usaha Kesejahteraan Sosial.
- Handitono, Siti Rahayu. 1993. "Jangan 'Menjompokan' Orang Tua", Jakarta : Republika.

- SURADI**, Ajun Peneliti Madya di Puslitbang Kesos, Badan Diklit Kesos, Depsos RI